

PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI *TRIGGER* ADVOKASI KEBIJAKAN PROGRAM KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

Afdi Bintang Syabana, Retna Hanani

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Public discussion about alleged mistargeting of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) program at Universitas Diponegoro in 2024 went viral on social media and Triggered a surge of digital advocacy. This study analyzes social media as a Policy-advocacy Trigger and explains coalition negotiation within the Policy Subsystem using the Advocacy Coalition Framework (ACF). Employing a qualitative descriptive-analytic design, the study draws on in-depth interviews with university bureaucratic actors and student organizations, complemented by documentation of social media content and relevant internal documents. Findings reveal two dominant coalitions: an institutional coalition emphasizing procedural legitimacy and privacy protection, and a transparency-distributive coalition emphasizing targeting fairness, transparency, and accountability. Social media acts as a strategic resource for issue framing, public opinion mobilization, and Pressure Politics that accelerate institutional responses. A Policy Broker role emerges through mediation mechanisms and communication channels that reduce conflict escalation and foster Policy-oriented learning. Coalition interaction produces Policy Outputs such as reactivating an official complaint channel, strengthening routine recipient evaluation (including an additional personal-income indicator), and initiating plans for field verification (offline surveys). Nevertheless, social-media advocacy also carries risks of doxxing, cyberbullying, and social stigmatization, calling for stronger digital ethics and clearer mediation governance.

Keywords: *social media; Policy advocacy; KIP-K; advocacy coalitions; Policy Broker; ACF.*

ABSTRAK

Isu dugaan ketidaktepatan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro pada 2024 menjadi viral di media sosial dan memicu eskalasi advokasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial sebagai *Trigger* advokasi kebijakan serta menjelaskan proses negosiasi antarkoalisi dalam *Policy Subsystem* menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik wawancara mendalam terhadap aktor birokrasi kampus dan organisasi mahasiswa, serta dokumentasi konten media sosial dan dokumen internal terkait KIP-K. Hasil penelitian menunjukkan terbentuk dua koalisi utama: koalisi institusional yang menekankan legitimasi prosedural dan perlindungan privasi penerima, serta koalisi transparansi-distributif yang menekankan keadilan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas. Media sosial berfungsi sebagai sumber daya strategis untuk framing isu, mobilisasi opini publik, serta *Pressure Politics* yang mendorong respons institusi. Peran *Policy Broker* beroperasi melalui mediasi dan kanal komunikasi lintas-aktor yang menurunkan eskalasi konflik serta mendorong pembelajaran kebijakan. Negosiasi antarkoalisi menghasilkan *Policy Output* berupa aktivasi kembali kanal aduan resmi, penguatan evaluasi rutin penerima (termasuk penambahan indikator pendapatan pribadi), serta rencana verifikasi lapangan (offline survey). Namun, advokasi berbasis media sosial juga memunculkan risiko doxxing, cyberbullying, dan stigmatisasi sosial sehingga memerlukan penguatan etika digital dan tata kelola mediasi yang jelas.

Kata kunci: media sosial; advokasi kebijakan; KIP-K; koalisi advokasi; *Policy Broker*; Advocacy Coalition Framework.

1. Pendahuluan

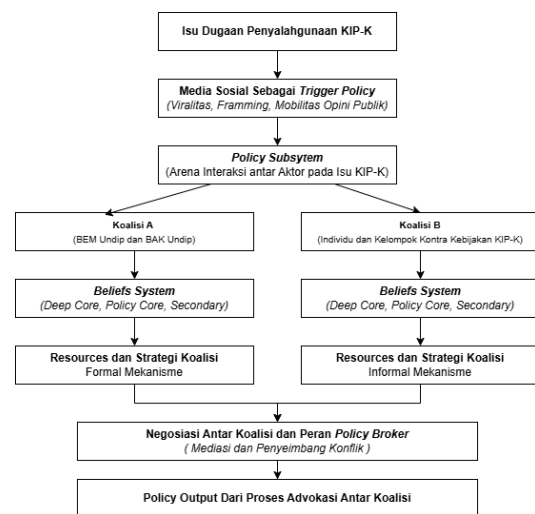
Media sosial berkembang dari kanal komunikasi personal menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi penyebaran informasi, pembentukan opini, serta tekanan politik terhadap lembaga formal. Dalam konteks tata kelola publik, ruang digital memperluas bentuk partisipasi warga termasuk mahasiswa untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan, terutama ketika saluran formal dipersepsikan lambat atau tidak responsif.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tataran implementasi, program ini menuntut akurasi sasaran dan akuntabilitas karena menyangkut distribusi sumber daya publik. Di tingkat perguruan tinggi, tata kelola KIP-K melibatkan proses verifikasi data, pemantauan penerima, serta mekanisme pengaduan. Ketika aspek-aspek tersebut dinilai tidak berjalan memadai, ruang digital sering dipakai sebagai kanal advokasi alternatif.

Pada 2024, muncul isu dugaan ketidaktepatan sasaran penerima KIP-K di Universitas Diponegoro yang kemudian viral melalui unggahan, komentar, dan amplifikasi warganet. Viralitas tersebut memicu dua respons yang berjalan parallel, di satu sisi, muncul tuntutan transparansi dan evaluasi penerima di sisi lain, muncul kekhawatiran atas pelanggaran privasi serta potensi stigmatisasi terhadap penerima beasiswa. Kontestasi ini tidak berhenti pada benar-salah kasus individual, melainkan berkembang menjadi

negosiasi kebijakan dalam subsistem KIP-K di level kampus.

Banyak kajian mengenai KIP-K menyoroti implementasi program dan hambatan pelayanan, tetapi masih terbatas yang memetakan dinamika koalisi advokasi dan peran mediasi (*Policy Broker*) ketika advokasi dipicu oleh viralitas media sosial. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) untuk menjelaskan pembentukan koalisi berdasarkan *Belief System*, penggunaan *Resources* dan *strategies*, serta mekanisme negosiasi yang menghasilkan *Policy Output*.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana media sosial berperan sebagai *Trigger* advokasi kebijakan KIP-K di Universitas Diponegoro; dan (2) bagaimana proses negosiasi antarkoalisi terjadi hingga menghasilkan *Policy Output*. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran media sosial sebagai pemicu advokasi serta menjelaskan mekanisme negosiasi antarkoalisi dalam *Policy Subsystem*.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

2.1 Media Sosial dan Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya terencana untuk memengaruhi agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pada era digital, advokasi tidak hanya berlangsung lewat jalur formal (audiensi, lobi, naskah kebijakan), tetapi juga melalui jalur informal seperti kampanye opini di media sosial. Platform digital memungkinkan aktor memperluas jangkauan pesan, membangun framing isu, dan memobilisasi dukungan dengan cepat. Secara politik, “percepatan” ini dapat menggeser perhatian publik dan mendorong institusi merespons lebih segera.

2.2 Dinamika Viralitas dan Tekanan Politik (*Pressure Politics*)

Viralitas bekerja melalui logika algoritmik: konten yang memantik emosi—marah, kecewa, atau rasa keadilan—cenderung memperoleh engagement lebih tinggi. Dalam advokasi, viralitas sering menjadi bentuk *Pressure Politics* karena institusi menghadapi risiko reputasi. Pada saat yang sama, viralitas dapat menyederhanakan isu kompleks menjadi narasi hitam-putih sehingga membuka ruang misinformasi. Karenanya, penelitian kebijakan perlu menyeimbangkan analisis efektivitas tekanan publik dengan analisis risiko sosial yang timbul.

2.3 Risiko Advokasi Digital: Doxxing, Cyberbullying, dan Stigmatisasi

Advokasi berbasis media sosial memiliki konsekuensi etis: doxxing (penyebaran data pribadi tanpa izin), *Cyberbullying Doxxing Bullying* (perundungan daring), serta stigmatisasi sosial. Isu bantuan pendidikan rentan memunculkan penilaian publik berbasis moralitas visual (misalnya penampilan dan

gaya hidup) yang belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi. Risiko ini penting karena dapat merugikan individu yang menjadi sasaran, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap program bantuan.

2.4 *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

ACF (Sabatier & Jenkins-Smith) menempatkan perubahan kebijakan sebagai hasil interaksi dalam *Policy Subsystem*, yakni arena isu-spesifik yang melibatkan berbagai aktor (pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, media, dan publik). Dalam *Subsystem*, aktor membentuk *advocacy coalitions*—kelompok yang terikat oleh kesamaan *Policy core beliefs*—serta menggunakan *Resources* dan *strategies* untuk memengaruhi *decision*. ACF juga mengenalkan *Policy Broker*, yaitu aktor yang berupaya meredakan konflik dan mencari kompromi yang dapat diterima. Selain itu, ACF menekankan *Policy-oriented learning*, yakni proses pembelajaran antarkoalisi yang dapat menghasilkan perubahan kebijakan, terutama pada level *secondary aspects*.

Dalam penelitian ini, ACF digunakan untuk memetakan: (a) struktur *Subsystem* KIP-K; (b) identifikasi koalisi A dan koalisi B; (c) *Belief System* (*deep core*, *Policy core*, *secondary*); (d) *Resources* dan *strategies*; (e) peran *Policy Broker*; dan (f) *Policy Output* hasil negosiasi antarkoalisi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Lokasi penelitian berada di Universitas Diponegoro dengan fokus pada dinamika advokasi isu KIP-K tahun 2024. Informan

dipilih secara purposive, meliputi aktor birokrasi kampus yang terlibat dalam tata kelola KIP-K, kelompok mahasiswa yang terlibat dalam advokasi/komunikasi isu, serta aktor mediasi yang berperan menjembatani komunikasi antarpihak.

Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur, (2) dokumentasi dokumen internal terkait tata kelola KIP-K (mekanisme verifikasi dan pengaduan), serta (3) dokumentasi konten media sosial sebagai jejak framing dan eskalasi isu. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik berbasis komponen ACF, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan triangulasi data (wawancara–dokumen–konten media sosial).

Pertimbangan etis dilakukan dengan menjaga anonimitas informan dan menghindari publikasi data pribadi. Kutipan wawancara dipakai secara selektif untuk menegaskan pola temuan tanpa mengekspos identitas.

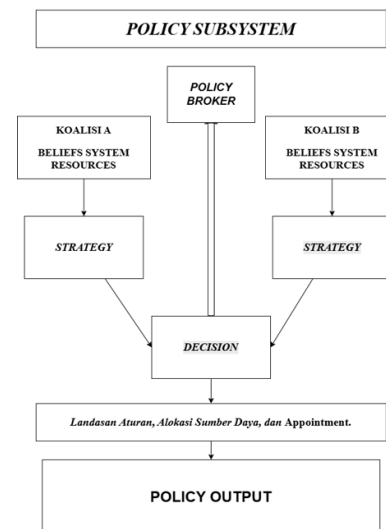
4. Hasil Penelitian

4.1 Policy Subsystem KIP-K di Universitas

Diponegoro

Policy Subsystem KIP-K mencakup aktor formal yang memiliki otoritas administratif serta aktor nonformal yang menggerakkan advokasi di ruang digital. Temuan menunjukkan bahwa *Subsystem* ini setidaknya melibatkan: (a) birokrasi kampus melalui unit pengelola beasiswa/KIP-K; (b) organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi

representasi dan advokasi; serta (c) jaringan publik digital (akun media sosial dan warganet) yang memperkuat viralitas isu. Interaksi antarpihak terjadi melalui kombinasi kanal formal (koordinasi internal, klarifikasi resmi, pengaduan) dan kanal informal (unggahan, komentar, dan percakapan publik di media sosial).



Gambar 2. Framework Policy Subsystem dalam ACF

Tabel 1 merangkum pemetaan aktor dan posisi dasar dalam *Subsystem*.

Aktor/Unit	Kategori dalam ACF	Peran utama	Sumber daya dominan
Birokrasi kampus (pengelola KIP-K/kemahasiswaan)	Koalisi institusional (A)	Kepatuhan prosedural; verifikasi; klarifikasi resmi; pengelolaan pengaduan	Akses formal; data administrasi; kewenangan; legitimasi institusi
Organisasi mahasiswa (mis. BEM/komunitas advokasi)	Koalisi transparansi-distributif (B)	Representasi aspirasi; pengawasan sosial; mendorong evaluasi dan transparansi	Jaringan mahasiswa; legitimasi publik; kapasitas mobilisasi
Akun/komunitas media sosial dan warganet	Pendukung koalisi (B) / lingkungan Subsystem	Amplifikasi isu; framing; tekanan opini publik	Viralitas; jangkauan; interaksi jaringan digital

Aktor mediasi (mis. komunitas penengah)	<i>Policy Broker</i>	Menurunkan eskalasi; menengahi; membuka kanal komunikasi dan solusi	Kepercayaan dua pihak; akses komunikasi lintas-aktor
---	----------------------	---	--

Tabel 1. Pemetaan aktor dalam *Policy Subsystem* KIP-K (ringkasan temuan penelitian).

4.2 Identifikasi Koalisi Advokasi

Dalam *Subsystem* KIP-K, terbentuk dua koalisi advokasi yang berbeda pada level *Policy core* beliefs. Koalisi A (institusional) menempatkan prioritas kebijakan pada kepatuhan prosedural, validasi berbasis data resmi, dan perlindungan privasi penerima. Koalisi ini cenderung meminimalkan kanal informal karena berisiko memperuncing stigma dan berpotensi melanggar kerahasiaan data.

Koalisi B (transparansi-distributif) menekankan bahwa isu utama adalah keadilan sasaran dan akuntabilitas distribusi. Koalisi ini memandang media sosial efektif sebagai jalur advokasi karena dapat mempercepat respons institusi melalui tekanan opini publik. Di dalam temuan wawancara, beberapa informan menilai bahwa “blow-up” di media sosial sering kali menjadi pemicu agar isu memperoleh perhatian kelembagaan secara cepat.

Perbedaan orientasi tersebut membentuk kontestasi narasi: “transparansi–keadilan distributif” versus “prosedural–privasi”. Kontestasi ini menjadi latar munculnya peran *Policy Broker* untuk menurunkan eskalasi konflik dan mengarahkan *Subsystem* menuju solusi yang lebih terukur.

4.3 Sistem Keyakinan (*Belief System*)

ACF membagi keyakinan ke dalam tiga lapisan: *Deep core Beliefs* (nilai dasar), *Policy core beliefs* (keyakinan inti tentang arah kebijakan), dan *secondary beliefs* (preferensi teknis). Temuan menunjukkan kedua koalisi relatif memiliki kesamaan pada level *deep core* yakni pendidikan sebagai hak dan bantuan harus tepat guna namun berkonflik pada *Policy core* dan *secondary beliefs* terkait mekanisme transparansi, privasi, dan verifikasi.

Tabel 2 merangkum perbedaan keyakinan Koalisi A dan Koalisi B.

Lapisan keyakinan	Koalisi A (institusional)	Koalisi B (transparansi-distributif)
<i>Deep core beliefs</i>	Pendidikan sebagai hak; bantuan untuk yang membutuhkan; stabilitas dan ketertiban institusi penting	Pendidikan sebagai hak; bantuan harus tepat sasaran; keadilan sosial perlu ditegakkan
<i>Policy core beliefs</i>	Legitimasi prosedural; perlindungan privasi; keputusan berbasis data resmi dan mekanisme internal	Transparansi; keadilan distributif; akuntabilitas publik; evaluasi penerima harus tegas
<i>Secondary beliefs</i>	Penguatan kanal aduan resmi; verifikasi administratif; klarifikasi institusional bertahap	Pengawasan digital; desakan evaluasi cepat; publikasi isu untuk mempercepat perhatian

Tabel 2. Ringkasan *Belief System* Koalisi A dan Koalisi B (berdasarkan wawancara dan dokumentasi).

4.4 Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya menentukan kapasitas koalisi untuk memengaruhi proses kebijakan. Koalisi A memiliki akses formal pada proses pengambilan keputusan dan data administratif, sehingga dapat mengendalikan prosedur

verifikasi, evaluasi, dan keluaran kebijakan. Koalisi B memiliki kekuatan pada legitimasi publik, jaringan digital, dan kemampuan membangun framing isu yang resonan dengan rasa keadilan mahasiswa.

Tabel 3 merangkum perbandingan sumber daya utama kedua koalisi.

Jenis sumber daya	Koalisi A	Koalisi B
Akses formal	Tinggi (kewenangan prosedural, koordinasi internal, keputusan)	Rendah–sedang (akses melalui representasi/advokasi)
Legitimasi	Tinggi (otoritas dan mandat institusi)	Sedang–tinggi (legitimasi moral dan dukungan mahasiswa/warganet)
Informasi & data	Data administratif penerima; arsip verifikasi; dokumen kebijakan	Informasi lapangan; pengalaman mahasiswa; jejak digital
Jaringan mobilisasi	Jaringan birokrasi dan unit internal	Jaringan mahasiswa; komunitas digital; amplifikasi viralitas
Kontrol narasi	Klarifikasi resmi; framing prosedural	Framing “keadilan”; <i>Pressure Politics</i> ; kampanye opini

Tabel 3. Perbandingan *Resources* Koalisi A dan Koalisi B dalam *Subsystem* KIP-K.

4.5 Strategi Advokasi

Strategi Koalisi A cenderung formal: menjaga prosedur, melakukan klarifikasi bertahap, dan mengarahkan keluhan ke kanal resmi. Strategi ini bertujuan menghindari kesimpangsiuran data serta melindungi privasi penerima. Strategi Koalisi B lebih informal dan berbasis media sosial: membangun narasi, memobilisasi dukungan, serta menekan institusi agar melakukan evaluasi. Di sisi lain, strategi informal berpotensi menghasilkan “trial by social media” ketika publik menghakimi berdasarkan potongan informasi.

Tabel 4 merangkum strategi dominan kedua koalisi.

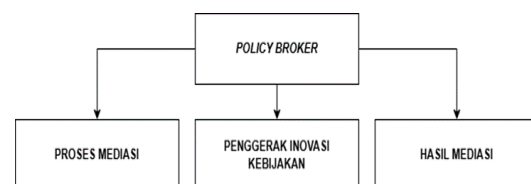
Aspek	Koalisi A (formal)	Koalisi B (informal/digital)
Tujuan taktis	Stabilisasi isu; kepatuhan prosedural; validasi data; perlindungan privasi	Akselerasi respons; evaluasi penerima; transparansi dan akuntabilitas
Saluran	Koordinasi internal; pengumuman resmi; kanal aduan internal	Unggahan media sosial; tagar; thread; kampanye opini
Teknik	Klarifikasi; verifikasi; pembatasan informasi sensitif	Framing isu; amplifikasi; tekanan reputasi
Risiko	Dianggap lambat/tidak responsif; jarak komunikasi	Doxxing/cyberbullying; stigmatisasi; misinformasi

Tabel 4. Strategi advokasi Koalisi A dan Koalisi B serta implikasinya.

4.6 Peran *Policy Broker* dan Proses Mediasi

Dalam situasi konflik, *Policy Broker* berperan sebagai penengah yang berupaya meredakan eskalasi, menjaga komunikasi, dan mencari kompromi yang dapat diterima. Temuan menunjukkan peran mediasi berjalan melalui tiga mekanisme: (1) membangun kanal komunikasi antara mahasiswa dan birokrasi; (2) menegosiasikan bentuk respons agar tetap akuntabel tanpa membuka data pribadi; dan (3) menginisiasi solusi praktis sebagai jalan tengah antara tuntutan transparansi dan kebutuhan perlindungan privasi.

Gambar 2 menggambarkan alur peran *Policy Broker* yang mencakup proses mediasi, penggerak inovasi kebijakan, dan hasil mediasi.

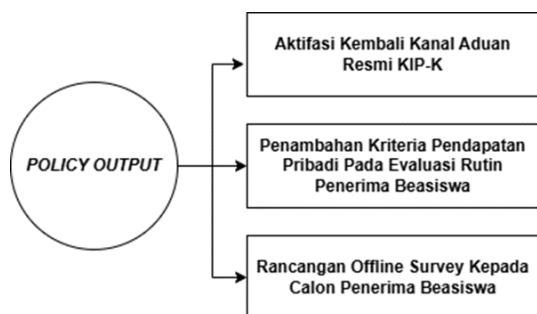


Gambar 3. Peran *Policy Broker* dalam proses mediasi

4.7 Policy Output

Interaksi antarkoalisi dan mediasi *Policy Broker* menghasilkan *Policy Output* pada level kampus. *Policy Output* ini dapat dipahami sebagai perubahan/penyesuaian pada aspek teknis (*secondary aspects*) yang memperkuat akuntabilitas tanpa mengubah tujuan dasar program. Tiga keluaran utama yang teridentifikasi adalah: (1) aktivasi kembali kanal aduan resmi, (2) penguatan evaluasi rutin penerima, dan (3) rencana verifikasi lapangan (offline survey) untuk memperkaya validasi data.

Gambar 3 menampilkan ringkasan *Policy Output* yang dihasilkan.



Gambar 4. Ringkasan *Policy Output* KIP-K (gambar dari peneliti).

<i>Policy output</i>	Deskripsi ringkas	Rasional dalam ACF	Status implementasi (temuan)
Aktivasi kembali kanal aduan resmi KIP-K	Pembukaan/penataan kanal aduan untuk penerima agar keluhan tersalurkan melalui jalur formal dan terdata	Kompromi: akuntabilitas meningkat tanpa doxxing; memperkuat prosedur	Berjalan/diaktifkan sebagai respons terhadap eskalasi isu
Penambahan indikator pendapatan pribadi pada evaluasi rutin	Reformulasi indikator evaluasi untuk menguji konsistensi kondisi ekonomi penerima	Minor <i>Policy change</i> pada <i>secondary aspects</i> ; pembelajaran kebijakan	Mulai diinisiasi dan dibahas pada evaluasi internal
Rencana verifikasi lapangan (offline survey)	Rencana survei lapangan bagi calon penerima untuk memperkaya validasi dan mengurangi bias data	Perluasan instrumen verifikasi; memperkuat akuntabilitas distributif	Direncanakan (terkendala sumber daya dan waktu)

Tabel 5. *Policy Output* hasil negosiasi antarkoalisi dalam *Subsystem* KIP-K.

5. Pembahasan

Temuan penelitian menguatkan argumen ACF bahwa perubahan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh dinamika subsistem yang melibatkan berbagai aktor dengan sistem keyakinan berbeda. Pada kasus KIP-K, media sosial berperan sebagai pemicu (*Trigger*) yang mempercepat eskalasi konflik dan meningkatkan intensitas interaksi antarkoalisi. Viralitas dapat dipahami sebagai “external perturbation” yang menggeser perhatian, mengubah kalkulasi reputasi institusi, dan mendorong respons kebijakan lebih cepat dibandingkan mekanisme rutin.

Dari sisi *Belief System*, kedua koalisi memiliki kesamaan pada nilai dasar (*deep core*) bahwa akses pendidikan harus diperluas dan bantuan harus tepat guna. Namun, perbedaan muncul pada *Policy core*: Koalisi A menekankan legitimasi prosedural dan privasi, sedangkan Koalisi B menekankan transparansi dan keadilan distributif. Perbedaan ini menjelaskan mengapa strategi advokasi mereka kontras formal vs digital *pressure* dan mengapa konflik mudah meningkat ketika isu personalisasi (kasus individu) dibawa ke ruang publik.

Resources menjadi faktor kunci. Koalisi A memiliki otoritas dan data administratif, tetapi berisiko kehilangan legitimasi publik bila respons dianggap lambat. Koalisi B unggul pada mobilisasi opini publik, tetapi lemah pada akses formal sehingga cenderung memakai tekanan reputasi. Dalam konteks ini, media sosial bukan sekadar saluran komunikasi,

melainkan sumber daya politik yang dapat mengubah struktur insentif aktor formal.

Peran *Policy Broker* menjadi sangat penting untuk mencegah “spiral konflik” yang merusak kepercayaan publik dan membahayakan penerima bantuan. *Broker* bekerja sebagai penerjemah kepentingan: membawa kekhawatiran privasi dan prosedur ke hadapan koalisi digital, serta membawa tuntutan transparansi-keadilan ke hadapan institusi. Mekanisme mediasi menurunkan eskalasi dan membuka ruang kompromi berupa kanal aduan formal, penguatan evaluasi rutin, dan rencana verifikasi lapangan. Inilah bentuk *Policy-oriented learning: Subsystem* mempelajari kelemahan tata kelola (pengaduan, indikator evaluasi, dan validasi) lalu memperbaikinya.

Namun, pembelajaran kebijakan di ruang digital memiliki biaya sosial. Advokasi berbasis viralitas dapat menghasilkan doxxing dan stigmatisasi. Pada isu bantuan, publik sering menilai “kelayakan” berdasarkan simbol konsumsi (barang, gaya hidup) yang dapat menyesatkan. Karena itu, pembenahan kebijakan harus berjalan bersama pembenahan tata kelola komunikasi: standar respons krisis, protokol perlindungan data, dan edukasi etika digital. Institusi perlu menyediakan mekanisme penanganan isu yang cepat, transparan, tetapi tetap menjaga kerahasiaan data penerima.

Secara praktis, penelitian ini menyarankan pentingnya membangun “jalur respons cepat” dalam kebijakan beasiswa: kanal pengaduan yang mudah diakses, prosedur verifikasi yang jelas, publikasi indikator evaluasi (tanpa membuka data personal), serta partisipasi organisasi mahasiswa sebagai mitra

pengawasan yang terstruktur. Dengan demikian, advokasi digital tidak berhenti sebagai tekanan, tetapi dapat diinstitusionalisasikan menjadi mekanisme akuntabilitas yang aman.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Pertama, media sosial berperan signifikan sebagai *Trigger* advokasi kebijakan KIP-K di Universitas Diponegoro tahun 2024 karena mempercepat penyebaran isu, membangun framing keadilan, dan menciptakan tekanan opini publik yang mendorong respons institusi. Kedua, terbentuk dua koalisi advokasi dengan perbedaan *Policy core* beliefs: koalisi institusional yang menekankan legitimasi prosedural dan perlindungan privasi, serta koalisi transparansi-distributif yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sasaran. Ketiga, *Policy Broker* berperan menurunkan eskalasi konflik melalui mediasi dan kanal komunikasi yang menghasilkan *Policy Output* berupa aktivasi kanal aduan resmi, penguatan evaluasi rutin penerima, dan rencana verifikasi lapangan (offline survey). Keempat, advokasi berbasis media sosial mengandung risiko doxxing, cyberbullying, dan stigmatisasi sehingga membutuhkan protokol perlindungan data dan penguatan etika digital.

6.2 Saran

Bagi pengelola KIP-K di level kampus, diperlukan komunikasi publik yang responsif serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan terdokumentasi. Bagi organisasi mahasiswa, advokasi perlu diarahkan ke bentuk

pengawasan yang bertanggung jawab dengan menghindari penyebaran data pribadi. Bagi pemerintah/pengelola kebijakan pendidikan, perlu evaluasi berkala indikator kelayakan dan penguatan mekanisme verifikasi untuk mencegah ketidaktepatan sasaran. Untuk penelitian lanjutan, disarankan memperluas locus penelitian pada beberapa perguruan tinggi agar diperoleh perbandingan dinamika koalisi dan variasi peran *Policy Broker* dalam kebijakan beasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sabatier, P. A. (1998). The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1), 98–130.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, K. (2020). Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework. *Policy Studies Journal*, 48(4), 1007–1031.
- Ajeng Diah Larasati, et al. (2022). Analisis kebijakan program beasiswa kartu indonesia pintar-kuliah (KIP-K) di universitas diponegoro. *jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1). Retrieved from <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/91>
- Jumanah dan Hilda Rosita. (2023). Evaluasi program indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). Retrieved from <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/download/99/104>
- Krisna Dwi Darna Iswanto, et al. (2024). Analisis problematika program kartu indonesia pintar kuliah dengan menggunakan problem tree analysis. *Jurnal Media Akademik(JMA)*, 2(5). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/380332433_ANALISIS_PROBLEMATIKA_PROGRAM_KARTU_INDONESIA_PINTAR_KULIAH_DENGAN_MENGGUNAKAN_PROBLEM_TREE_ANALYSIS
- Melati Putri Arsika. (2024). Besaran Dana PIP 2024 untuk Siswa SD hingga SMA, Cek Rinciannya di Sini! *detiksumbagsel*. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7308740/besaran-dana-pip-2024-untuk-siswa-sd-hingga-sma-cek-rinciannya-di-sini>
- Nurul Sufni. (2024). Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 2(2). Retrieved from <https://publikasi.abidan.org/index.php/benefit/article/download/393/301/1444>
- Syafiq Febrianto, et al. (2024). Penyalahgunaan dana kartu indonesia pintar kuliah dan dampaknya terhadap pendidikan di indonesia. *collegium studiosum journal*, 7(1). Retrieved from <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1193/715/>
- VOI.ID. (2024). VIDEO: Alleged Abuse Of Lecture KIP By Several Students, One Of Them Selebgram. Retrieved from <https://voi.id/en/lifestyle/378244>
- Widia Zaharaa, et al. (2023). Implementasi kartu indonesia pintar terhadap kualitas pendidikan di kabupaten simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(4). Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/27738/13010>
- Christian. “Paradigma Administrasi Oleh Nicholas Henry.” *Optimalisasi Pemerintahan Demi Memajukan Bangsa*, 18 Aug. 2021, christiangamas.net/paradigma-administrasi-oleh-nicholas-henry/. Khozin, Muhammad. “Paradigma Sistem Administrasi Negara.” *Unisayogya.ac.id*, 2018, [lensa.unisayogya.ac.id/pluginfile.php/180237/mod_folder/content/0/5.%20PARADIGMA%20AN%20\(1\).pptx?forcedownload=1](http://lensa.unisayogya.ac.id/pluginfile.php/180237/mod_folder/content/0/5.%20PARADIGMA%20AN%20(1).pptx?forcedownload=1).
- Vira Nurul Sayidah, et al. “Media Baru Sebagai Ruang Emosional Publik: Diskursus Penyalahgunaan KIP-K Di Media Sosial X Periode April-Mei 2024.” *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 1–19, journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/3012/1562. Accessed 27 Oct. 2024.
- Nuranisa Fitri, Jurnal. ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENGGUNAAN KARTU E-MONEY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI. 2016.
- Nugroho, Alih. PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK BUNGA RAMPAI PERJALANAN KEILMUAN DARI PUBLIC ADMINISTRATION SAMPAI Ke PUBLIC GOVERNANCE. 2021.

Wesche, J., Dütschke, E., Negro, S., & Hekkert, M. (2025). Coalitions, Coordination, and Contestation: A Systematic Review of the ACF and its Implications for Sustainability Transitions Research. *Frontiers in Political Science*.

Bovaird, T., & Loeffler, E. (2023). The Co-production of Public Services and Outcomes: A Critical Discussion. *Public Money & Management*, 43(2), 85–94.